

Kajian Uang Pelicin dalam Tender Konstruksi Proyek X terhadap Kode Etik

by Layanan Digital

Submission date: 13-May-2025 08:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2674386457

File name: Pelicin_dalam_Tender_Konstruksi_Proyek_X_terhadap_Kode_Etik.pdf (729.53K)

Word count: 3806

Character count: 23443

Kajian Uang Pelicin dalam Tender Konstruksi Proyek X terhadap Kode Etik

Roger Matthew¹, Jimmy Chandra²

¹Prodi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Kristen Petra,
Roger.matt2531@gmail.com

²Prodi Teknik Sipil dan Prodi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Kristen Petra
chandra.jimmy@petra.ac.id

Abstract—Grease money in construction tenders is a form of corruption that undermines the integrity of the construction sector and violates professional codes of ethics. This study analyzes the key factors driving this practice through literature reviews, questionnaires directed at project stakeholders, and a Relative Importance Index (RII) analysis. The results reveal that personal connections, close relationships with project officials, and a lack of individual integrity are the primary causes. Recommendations include implementing transparent, electronic-based tender systems, providing anti-corruption training, and establishing independent oversight to enhance transparency and accountability in tender processes.

Keywords: grease money, construction tenders, codes of ethics, corruption, construction projects, independent supervision

Abstrak—Uang pelicin dalam tender konstruksi adalah bentuk korupsi yang merusak integritas sektor konstruksi dan melanggar kode etik profesional. Penelitian ini menganalisis faktor utama penyebab praktik ini melalui studi literatur, kuesioner kepada pemangku kepentingan proyek, serta analisis *Relative Importance Index* (RII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi pribadi, hubungan dekat dengan pejabat proyek, dan kurangnya integritas individu menjadi penyebab utama. Rekomendasi mencakup penerapan sistem tender transparan berbasis elektronik, pelatihan antikorupsi, dan pengawasan independen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses tender.

Kata Kunci : uang pelicin, tender konstruksi, kode etik, korupsi, proyek konstruksi, pengawasan independen.

I. PENDAHULUAN

Uang Pelicin dalam tender konstruksi merupakan permasalahan serius yang menuntut perhatian dari berbagai pihak. Uang Pelicin merupakan tindakan pemberian uang suap kepada pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah kemenangan pihak tertentu [1]. Praktik pemberian atau penerimaan sesuatu secara tidak wajar ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Kode etik profesi yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, nampaknya belum mampu menjadi benteng pertahanan yang efektif. Lemahnya internalisasi nilai-nilai etika, kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum, serta adanya tekanan untuk mencapai target tertentu menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kode etik seringkali dilanggar [2]. Selain itu, sistem pengawasan yang belum optimal juga turut berkontribusi terhadap maraknya praktik Uang Pelicin [3].

Dampak dari praktik Uang Pelicin dalam proyek konstruksi bisa sangat signifikan. Selain menambah biaya proyek secara keseluruhan, uang pelicin dapat menimbulkan risiko hukum, dianggap sebagai tindakan ilegal, dan dikenakan sanksi tegas, termasuk denda besar dan pencabutan izin usaha [4]. Selain itu, praktik ini juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan publik [5].

Salah satu bentuk suap yang sering terjadi dalam tender konstruksi adalah pemberian "uang pelicin" pada tahap *aanwijzing*. *Aanwijzing* merupakan tahap klarifikasi teknis dalam proses tender di mana peserta lelang dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait dokumen lelang [6]. Namun, dalam praktiknya, tahap ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meminta imbalan tertentu agar pertanyaan atau klarifikasi dijawab secara menguntungkan. Praktik ini menciptakan ketidakadilan bagi peserta lelang lainnya dan mengaburkan prinsip persaingan sehat dalam tender [7]. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi beberapa kendala dalam upaya pencegahan korupsi. Di sisi lain, penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penyebab utama tindak korupsi dalam sebuah proyek konstruksi adalah evaluasi penentuan tender yang tidak sesuai kriteria, yakni poin utama dalam pentingnya penegakan proses *aanwijzing* yang benar dan sesuai dengan kode etik [8].

Dalam konteks Proyek X, adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam praktik Uang Pelicin semakin memperparah situasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Uang Pelicin bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang memerlukan solusi komprehensif. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena Uang Pelicin dalam proyek ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi akar

permasalahan praktik uang pelicin, mengkaji dinamika penerapan kode etik, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan.

II. LANDASAN TEORI

A. Uang Pelicin

Dalam konteks proyek konstruksi, "uang pelicin" merujuk pada bentuk pembayaran informal atau suap yang diberikan kepada pihak tertentu dengan tujuan mempercepat proses administrasi, perizinan, atau penyelesaian proyek [9]. Praktik ini seringkali dianggap sebagai bentuk korupsi karena melibatkan penggunaan sumber daya finansial untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang seharusnya dijalankan sesuai prosedur standar. Di sektor konstruksi, praktik Uang Pelicin bisa terjadi di berbagai tahap proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian, terutama karena sektor ini melibatkan interaksi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pengawas, hingga pemasok.

Dalam hukum di Indonesia, praktik uang pelicin, suap, dan gratifikasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menekan korupsi serta menjaga integritas dan transparansi dalam sektor publik dan bisnis. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999, menetapkan bahwa suap, gratifikasi, dan tindakan korupsi lainnya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar antara uang pelicin, gratifikasi, dan suap. Uang pelicin seringkali mengacu pada pembayaran kecil yang diberikan untuk mempercepat proses birokrasi, misalnya dalam memperoleh izin atau mempercepat persetujuan proyek [10]. Pada konteks proyek konstruksi, uang pelicin biasanya diberikan agar pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai representasi perusahaan atau pemerintahan dapat memenangkan pihak tertentu atas proyek tersebut.

B. Kode Etik

Secara teoritis, kode etik mengacu pada seperangkat prinsip dan standar moral yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku profesional agar tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga menghormati tanggung jawab sosial dan hukum [11]. Dalam teori etika bisnis, hal ini disebut sebagai *duty ethics*, di mana seseorang memiliki kewajiban untuk bertindak secara jujur dan transparan, terlepas dari hasil atau konsekuensi pribadi yang mungkin timbul. Dalam hal proyek konstruksi, pemberian uang pelicin bisa menggiring profesional melanggar kode etik yang menuntut untuk bekerja sesuai dengan prosedur standar tanpa memanfaatkan posisi untuk keuntungan finansial yang tidak sah.

Praktik Uang Pelicin dapat dipahami dalam kerangka teori korupsi dan etika bisnis. Dalam teori korupsi, praktik ini tergolong dalam kategori *petty corruption* atau korupsi kecil-kecilan, yang seringkali dianggap sebagai upaya untuk memperlancar proses birokrasi atau menghindari prosedur yang dianggap terlalu berbelit-belit [12]. Namun, dari perspektif etika bisnis, pemberian uang pelicin dapat merusak transparansi dan akuntabilitas serta menciptakan ketidakadilan di pasar [13]. Perusahaan yang memberikan

uang pelicin mungkin mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak tersedia bagi perusahaan lain, sehingga mengurangi persaingan yang sehat dan memengaruhi kualitas proyek.

Dalam konteks proyek konstruksi, kode etik memainkan peran penting dalam mencegah praktik-praktik yang merusak integritas dan transparansi, seperti uang pelicin. Kode etik dalam profesi konstruksi dirancang untuk membimbing profesional dalam menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, organisasi profesional seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII) atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) telah menetapkan kode etik yang ketat bagi para profesional di bidang konstruksi, mengharuskan para profesional untuk menghindari konflik kepentingan, termasuk penerimaan atau pemberian uang pelicin, yang dapat merusak proses proyek.

Selain itu, dari perspektif *virtue ethics* atau etika kebajikan, profesional konstruksi diharapkan mengembangkan karakter yang unggul, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penerapan etika kebajikan ini berarti menolak praktik-praktik tidak sah, termasuk uang pelicin, yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas profesional. Jika kode etik diabaikan dan uang pelicin menjadi praktik yang umum, maka risiko munculnya korupsi sistemik meningkat, yang akan berdampak negatif pada kualitas hasil proyek, reputasi perusahaan, dan kepercayaan publik. Dengan demikian, kode etik dalam bidang konstruksi tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku profesional tetapi juga sebagai pelindung integritas sektor konstruksi secara keseluruhan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

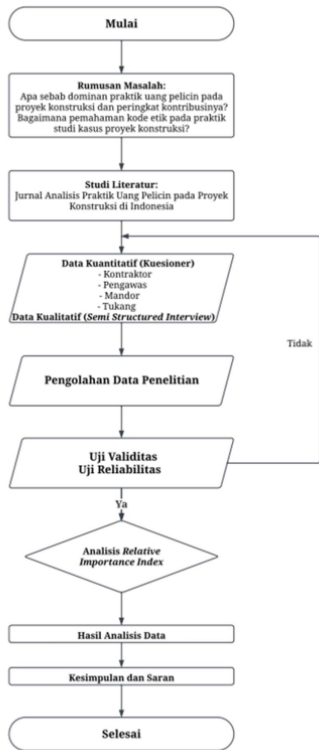
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Partisipan/subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berpengalaman pada bidang pekerjaan sipil. Beberapa contoh partisipan/subjek adalah kontraktor, pengawas, tukang, mandor, dan tenaga kerja lainnya. Partisipan dipilih karena dinilai memiliki keahlian khusus di bidangnya dan mengerti makna dari uang pelicin.

Prosedur penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari judul yang sudah ditentukan, dilakukan studi terhadap kesadaran, persepsi, dan tindakan terhadap uang pelicin dalam tender proyek konstruksi.
2. Setelah dilakukan studi dari jurnal dan literatur, dilakukan pengumpulan data dari penyebaran kuesioner kepada target partisipan sebagai bentuk data primer penelitian ini.
3. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dilakukan analisis dengan pengujian validitas, reliabilitas, dan *Relative Importance Index* sebagai bentuk pembahasan dari penelitian.
4. Hasil analisis tersebut akan diintegrasikan bersama hasil analisis data sekunder melalui studi literatur dan *case study* terkait topik penelitian ini.
5. Proses terakhir dari penelitian ini adalah menyimpulkan pembahasan dan membuat saran dari studi yang sudah dilakukan.

A. *Diagram Alir Penelitian*

Prosedur penelitian yang telah dijabarkan di atas, akan digambarkan di dalam diagram alir pada Gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

B. *Jenis Data*

Penelitian yang disusun oleh peneliti menggunakan data primer sebagai bahan untuk mengkaji masalah yang dibahas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dengan target yang dituju adalah kontraktor, pengawas, mandor, dan tukang.

C. *Perancangan Kuesioner*

Berikut ini merupakan isi kuesioner yang disebar kepada responden.

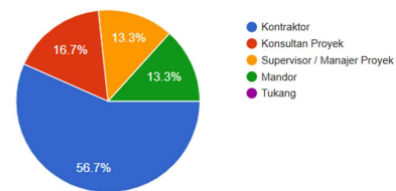
Tabel 1. Kuesioner

No	Faktor	Variabel	Simbol
1	Regulasi dan Sistem	Kurangnya transparansi dalam proses tender	X1.1
		Pengawasan yang tidak efektif dari pihak berwenang	X1.2
		Adanya celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku	X1.3
		Ketidajelasan kriteria penilaian tender	X1.4
		Tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman bagi pelapor tindakan kecurangan	X1.5
2	Faktor Organisasi	Tekanan untuk memenuhi target keuangan perusahaan	X2.1
		Budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi	X2.2
		Kurangnya pengendalian internal perusahaan	X2.3
		Pemimpin proyek yang tidak berintegritas	X2.4
		Hubungan kedekatan antara pejabat proyek dan penyedia jasa	X2.5
3	Faktor Ekonomi	Persaingan yang sangat ketat antar penyedia jasa	X3.1
		Insentif finansial yang besar untuk memenangkan tender	X3.2
		Adanya kebutuhan mendesak dari pihak pemilik proyek	X3.3
		Krisis ekonomi yang memicu perilaku tidak etis	X3.4
		Penawaran harga yang tidak realistis dalam proposal tender	X3.5

Tabel I. Draf Kuesioner (lanjutan)

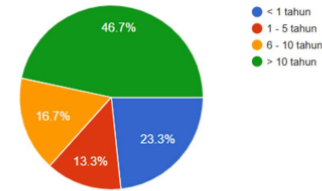
No	Faktor	Variabel	Simbol
4	Faktor Individu	Kurangnya integritas dan etika profesional individu	X4.1
		Motivasi pribadi untuk keuntungan finansial	X4.2
		Ketergantungan pada pihak tertentu untuk memenangkan tender	X4.3
		Kurangnya pendidikan atau pelatihan tentang antikorupsi	X4.4
		Ketakutan terhadap ancaman atau sanksi dari pihak lain	X4.5
5	Kompleksitas Proyek	Besarnya nilai kontrak proyek yang menarik suap	X5.1
		Kompleksitas teknis proyek yang mempersulit verifikasi penawaran	X5.2
		Durasi proyek yang panjang, memberikan lebih banyak peluang suap	X5.3
		Ketidakjelasan spesifikasi teknis proyek	X5.4
		Ketergantungan tinggi pada subkontraktor tertentu	X5.5
6	Faktor Hubungan Sosial	Adanya tekanan dari pihak eksternal untuk memilih peserta tertentu	X6.1
		Adanya kesepakatan tidak resmi antar pihak peserta tender	X6.2
		Ketergantungan pada jaringan atau koneksi pribadi dalam proses tender	X6.3

berasal dari kontraktor di urutan pertama dan disusul oleh konsultan proyek sebagai urutan kedua.



Gambar 2. Persentase Afiliasi Profesional Responden

Berdasarkan Gambar 3 hasil pengumpulan kuesioner diperoleh pengalaman kerja responden paling tinggi pada rentang diatas 10 tahun sejumlah 46.7%, rentang di bawah 1 tahun sejumlah 23.3%, rentang 6-10 tahun sejumlah 16.7% dan rentang 1-5 tahun sejumlah 13.3%.



Gambar 3. Persentase Pengalaman Kerja Responden

B. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memeriksa valid atau tidaknya dari variabel yang diteliti. Metode pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai R yang dihitung menggunakan perhitungan Excel dengan nilai R dari tabel. Variabel dinyatakan valid apabila nilai R hasil penghitungan lebih besar atau sama dengan nilai R tabel. Besarnya nilai R tersebut dihitung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan jumlah sampel yang didapat (30), diketahui bahwa nilai R tabel sebesar 0,361. Berikut ini akan dilampirkan hasil uji validitas pada Tabel II di bawah ini.

Tabel II. Hasil Uji Validitas

No	Simbol Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	X1.1	0.867	0.361	VALID
2	X1.2	0.821	0.361	VALID
3	X1.3	0.733	0.361	VALID
4	X1.4	0.803	0.361	VALID
5	X1.5	0.768	0.361	VALID
6	X2.1	0.752	0.361	VALID
7	X2.2	0.932	0.361	VALID
8	X2.3	0.788	0.361	VALID

IV. HASIL DAN ANALISIS

A. Deskripsi Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, didapat sebanyak 30 responden memiliki rentang umur dari 21 hingga 57. Dari hasil pengumpulan kuesioner diperoleh hasil afiliasi profesional responden berasal dari kontraktor sejumlah 56.7%, konsultan proyek sejumlah 16.7%, supervisor atau manajer proyek sejumlah 13.3%, dan mandor sejumlah 13.3%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. Dapat disimpulkan bahwa afiliasi responden terbanyak

No	Simbol Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
9	X2.4	0.893	0.361	VALID
10	X2.5	0.840	0.361	VALID
11	X3.1	0.806	0.361	VALID
12	X3.2	0.826	0.361	VALID
13	X3.3	0.836	0.361	VALID
14	X3.4	0.825	0.361	VALID
15	X3.5	0.852	0.361	VALID
16	X4.1	0.627	0.361	VALID
17	X4.2	0.717	0.361	VALID
18	X4.3	0.733	0.361	VALID
19	X4.4	0.822	0.361	VALID
20	X4.5	0.857	0.361	VALID
21	X5.1	0.796	0.361	VALID
22	X5.2	0.769	0.361	VALID
23	X5.3	0.757	0.361	VALID
24	X5.4	0.687	0.361	VALID
25	X5.5	0.773	0.361	VALID
26	X6.1	0.814	0.361	VALID
27	X6.2	0.778	0.361	VALID
28	X6.3	0.871	0.361	VALID

1
C. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dapat konsisten berdasarkan analisis dengan perhitungan Excel. Dengan kata lain, uji reliabilitas dapat menjadi sumber apakah kuesioner yang telah terkumpul reliabel atau tidak. Kuesioner akan dinyatakan reliabel apabila jawaban dari responden konsisten terhadap satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Nilai dari *Cronbach's Alpha* akan memutuskan reliabel atau tidaknya kuesioner penelitian tersebut. Nilai *Cronbach's Alpha* harus > 0,6 agar memiliki tingkat reliabilitas yang dapat diakui. Berikut ini akan dilampirkan hasil uji reliabilitas pada Tabel III di bawah ini.

1
Tabel III. Hasil Uji Reliabilitas

No	Kategori	Cronbach's Alpha	N of Items
1	Regulasi dan Sistem	0.854	5
2	Faktor Organisasi	0.888	5

1 No	Kategori	Cronbach's Alpha	N of Items
3	Faktor Ekonomi	0.885	5
4	Faktor Individu	0.804	5
5	Kompleksitas Proyek	0.810	5
6	Faktor Hubungan Sosial	0.624	3

D. Uji Relative Importance Index (RII)

Uji *Relative Importance Index* dilakukan untuk menentukan variabel apa yang paling penting. Hasilnya akan diurutkan berdasarkan nilai RII tertinggi hingga terendah. **1** Berikut ini akan disajikan rekapitulasi hasil uji *Relative Importance Index* (RII) dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil uji RII akan disajikan pada Tabel IV di bawah ini.

1
Tabel IV. Hasil Uji *Relative Importance Index* (RRI)

No	Variabel	RII	Tingkat Kepentingan
1	Ketertarikan pada jaringan atau koneksi pribadi dalam proses tender	0.840	1 Sangat Tinggi
2	Hubungan kedekatan antara pejabat proyek dan penyedia jasa	0.833	Sangat Tinggi
3	Motivasi pribadi untuk keuntungan finansial	0.833	Sangat Tinggi
4	Kurangnya integritas dan etika profesional individu	0.820	Sangat Tinggi
5	Persaingan yang sangat ketat antar penyedia jasa	0.813	Sangat Tinggi
6	Pemimpin proyek yang tidak berintegritas	0.807	Sangat Tinggi
7	Insentif finansial yang besar untuk memenangkan tender	0.793	Tinggi
8	Adanya celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku	0.787	Tinggi
9	Besarnya nilai kontrak proyek yang menarik suap	0.787	Tinggi

No	Variabel	RII	Tingkat Kepentingan
10	Adanya kesepakatan tidak resmi antar pihak peserta tender	0.780	Tinggi
11	Adanya tekanan dari pihak eksternal untuk memilih peserta tertentu	0.773	Tinggi
12	Ketertangutan pada pihak tertentu untuk memenangkan tender	0.760	Tinggi
13	Kompleksitas teknis proyek yang mempersulit verifikasi penawaran	0.760	Tinggi
14	Budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi	0.753	Tinggi
15	Pengawasan yang tidak efektif dari pihak berwenang	0.753	Tinggi
16	Kurangnya transparansi dalam proses tender	0.753	Tinggi
17	Ketidajelasan spesifikasi teknis proyek	0.753	Tinggi
18	Tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman bagi pelapor tindakan kecurangan	0.740	Tinggi
19	Durasi proyek yang panjang, memberikan lebih banyak peluang suap	0.733	Tinggi
20	Ketertangutan tinggi pada subkontraktor tertentu	0.733	Tinggi
21	Ketidajelasan kriteria penilaian tender	0.727	Tinggi
22	Tekanan untuk memenuhi target keuangan perusahaan	0.720	Tinggi
23	Penawaran harga yang tidak realistis dalam proposal tender	0.707	Tinggi

No	Variabel	RII	Tingkat Kepentingan
24	Ketakutan terhadap ancaman atau sanksi dari pihak lain	0.700	Tinggi
25	Adanya kebutuhan mendesak dari pihak pemilik proyek	0.693	Tinggi
26	Kurangnya pengendalian internal perusahaan	0.687	Tinggi
27	Krisis ekonomi yang memicu perilaku tidak etis	0.687	Tinggi
28	Kurangnya pendidikan atau pelatihan tentang antikorupsi	0.667	Tinggi

E. Pembahasan

Pada penelitian ini, teridentifikasi terdapat 6 kategori dengan 28 variabel yang menjadi penyebab terjadinya praktik uang pelicin pada tender konstruksi. Variabel yang menjadi pertanyaan dalam kuesioner diuji terlebih dahulu dengan uji validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya variabel yang digunakan. Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan, 28 variabel tersebut valid untuk digunakan sebagai variabel uji. Kemudian, dilakukan uji reliabilitas terhadap 6 kategori tersebut. 6 kategori tersebut lolos uji reliabilitas dengan nilai > 0,6. Dari setiap variabel tersebut, dilakukan uji *Relative Importance Index* (RII) untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap variabel terhadap topik yang dibahas. Dari hasil uji RII, menunjukkan bahwa terdapat 6 variabel dengan kategori tingkat kepentingan sangat tinggi ($\geq 0,8$). 6 variabel tersebut menjadi faktor utama penyebab praktik uang pelicin berdasarkan respon para responden karena memiliki tingkat kepentingan sangat tinggi dalam pengaruhnya terhadap munculnya praktik uang pelicin pada tender konstruksi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor utama penyebab munculnya praktik uang pelicin pada tender konstruksi adalah, sebagai berikut:

1. Ketertangutan pada jaringan atau koneksi pribadi dalam proses tender.
2. Hubungan kedekatan antara pejabat proyek dan penyedia jasa.
3. Motivasi pribadi untuk keuntungan finansial.
4. Kurangnya integritas dan etika profesional individu.
5. Persaingan yang sangat ketat antar penyedia jasa.
6. Pemimpin proyek yang tidak berintegritas.

Faktor-faktor di atas menjadi faktor dengan kategori tingkat kepentingan sangat tinggi berdasarkan uji dengan

metode *Relative Importance Index* (RII) dengan nilai $\geq 0,8$. Dari uji RII tersebut, variabel-variabel di atas teridentifikasi menjadi faktor utama penyebab munculnya praktik uang pelicin pada tender konstruksi. 22 variabel terakhir memiliki tingkat kepentingan dengan kategori tinggi dalam pengaruhnya terhadap munculnya praktik uang pelicin pada tender konstruksi.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dalam mencegah munculnya praktik uang pelicin pada tender konstruksi diantaranya:

1. Menggunakan sistem tender elektronik yang transparan untuk mengurangi interaksi langsung antara pihak terkait.
2. Memberikan pelatihan kepada staf proyek mengenai risiko dan konsekuensi dari praktik uang pelicin.
3. Memberlakukan hukuman administratif, finansial, atau hukum yang berat bagi pihak yang terbukti melakukan praktik curang.
4. Membentuk tim pengawas independen yang memantau setiap tahap proses tender.

Penelitian mendatang sebaiknya difokuskan pada setiap jenis proyek konstruksi untuk mengidentifikasi pola korupsi yang spesifik pada masing-masing jenis proyek. Selain itu, analisis lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi lokasi proyek konstruksi yang terindikasi korupsi di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bahan perbandingan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fauzan, Fauzan. (Oktober, 2024). Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Pemerintahan. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan. [online]. Vol 11, No 2. Tersedia: <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/52/52>
- [2] Pujiastuti, Nanik. (Mei, 2023). DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya. [online]. 24(1), pp.30-39. Tersedia: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/7086>
- [3] Burhanudin, Burhanudin. (Juni, 2013). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi. Jurnal Cita Hukum. [online]. 1(1), p.95936. Tersedia: <https://www.neliti.com/publications/95936/tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-korporasi>
- [4] Ervianto, W.I. (September, 2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional Indonesia. Simposium II UNIID 2017. 2(1), pp.98-103.
- [5] Azzam, A. (2014). Pemberitaan Kasus Korupsi Proyek Hambalang Pada Harian Kompas (Studi Analisis Isi Kuantitatif Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Hambalang Yang Melibatkan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Pada Harian Kompas Edisi 1 Februari-31 Maret 2. [online]. Tersedia: https://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal_Abdullah%20Azzam_D1211001.pdf
- [6] Abimantara, G.C. and Purwito, A. (April, 2019). Analisa Kegagalan Kontraktor Dalam Proses Tender Sistem E-Procurement Pada Proyek Pemkot Surabaya Tahun. Axial: jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi. [online]. 7(1), pp.33-41. Tersedia: <http://dx.doi.org/10.30742/axial.v7i1.706>
- [7] Kombong, E. P., Nugroho, A. S. B. and Wibowo, R. A. (Juni, 2021) Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi: Civil Engineering Perspective. Integritas : Jurnal Antikorupsi. [online]. 6(2), pp. 245-262. Tersedia: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.665>
- [8] Ariani, V., Jumas, D.Y., Utama, W.P. and Wahyudi, W.W. (2023). Indikator penyebab praktik korupsi pada industri konstruksi di Sumatera Barat. Rekayasa Sipil. [online]. 17(1), pp.15-22. Tersedia: https://www.researchgate.net/profile/Vivi-Ariani/publication/366852395_Indikator_Penyebab_Praktik_Korupsi_pada_Industri_Konstruksi_di_Sumatera_Barat/links/63e1daef12f0d126cd1926cf5/Indikator-Penyebab-Praktik-Korupsi-pada-Industri-Konstruksi-di-Sumatera-Barat.pdf
- [9] Tim Pengkajian Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB (2006) 1 bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah suap ..., Badan Pembinaan Hukum Nasional. Available at: https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf (Accessed: 03 November 2024). https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf
- [10] Agustina, E., Izazi, I.M., Nurfauziah, L. and Agustiningrum, W., (Agustus, 2020). Mengungkap makna di balik budaya uang pelicin kepada aparat desa. Octoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan. [online]. 2(1), pp.39-43. Tersedia: <https://doi.org/10.34199/oh.2.1.2020.005>
- [11] Yarisetouw, H.T. (2015). Identifikasi Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Dalam Lingkup Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah (X). Tinjauan Dari Perspektif: Pemerintah Dan Kontraktor (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember). [online]. Tersedia: <http://repository.its.ac.id/id/eprint/62471>
- [12] Mashali, B. (Desember, 2012). Analyzing the relationship between perceived grand corruption and petty corruption in developing countries: case study of Iran. International Review of Administrative Sciences. [online]. 78(4), pp.775-787. Tersedia: <https://doi.org/10.1177/0020852312455991>
- [13] Tendean, D.S. (2022). PERAN ETIKA BISNIS DAN RELIGIUSITAS TERHADAP FRAUD RISK MANAGEMENT. Journal of Syntax Literate. [online]. 7(3). pp.2226. Tersedia: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=156379998&h=7FC%2B%2F40mOF9LF1OIQZDOKMf%2B3k%2BuW0TDD7%2BGsSfTS3ikREYORm3kZmx%2FW4%2Boz3Dz6syMY5Cnvj5lWSum8V6kw%3D%3D&crI=c>

Kajian Uang Pelicin dalam Tender Konstruksi Proyek X terhadap Kode Etik

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

linter.untar.ac.id

Internet Source

16%

2

ejournal2.pnp.ac.id

Internet Source

3%

3

rekayasasipil.ub.ac.id

Internet Source

3%

4

Yanuardi Wisnu Murti, Awan Santosa.
"Pengaruh Online Customer Review, Kualitas
Produksi Dan Promosi Terhadap Keputusan
Pembelian Pengguna Marketplace Tokopedia
Di Yogyakarta", Jurnal Akuntansi, Manajemen,
dan Perencanaan Kebijakan, 2025

Publication

2%

5

Agus Hendra Al Rahmad, Siti Fainurryzky
Annisa. "VIDEO ANIMASI SEBAGAI MEDIA
PENYULUHAN DAPAT MENINGKATKAN
PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG
BAHAYA FAST FOOD", Media Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, 2025

Publication

1%

6

pdfcoffee.com

Internet Source

1%

7

Submitted to Institut Pendidikan Guru
Malaysia

Student Paper

1%

8

code.osehra.org

Internet Source

1 %

9

www.pikiran-rakyat.com

Internet Source

1 %

10

ejournal.upi.edu

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On